



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan

Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. Penetapan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) pada tahun 1960-1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Di Kabupaten Bantul, karena pada

waktu itu belum dibentuk DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan. Berdasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. Pada tahun 2007 DLLAJ diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Pada Tahun 2016 terjadi pembentukan SOTK baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 5% pada akhir periode tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 2%. Indikator ini juga digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh mana dapat menurunkan/menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.

Pada periode Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas dengan target akhir periode sebesar 1,83% dengan capaian Tahun 2020 sebesar 1,95. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**. Melihat kinerja yang dihasilkan Dinas Perhubungan maka keberadaan Dinas Perhubungan masih diperlukan untuk menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rancana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20); sebagaimana diubah dengan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 D);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

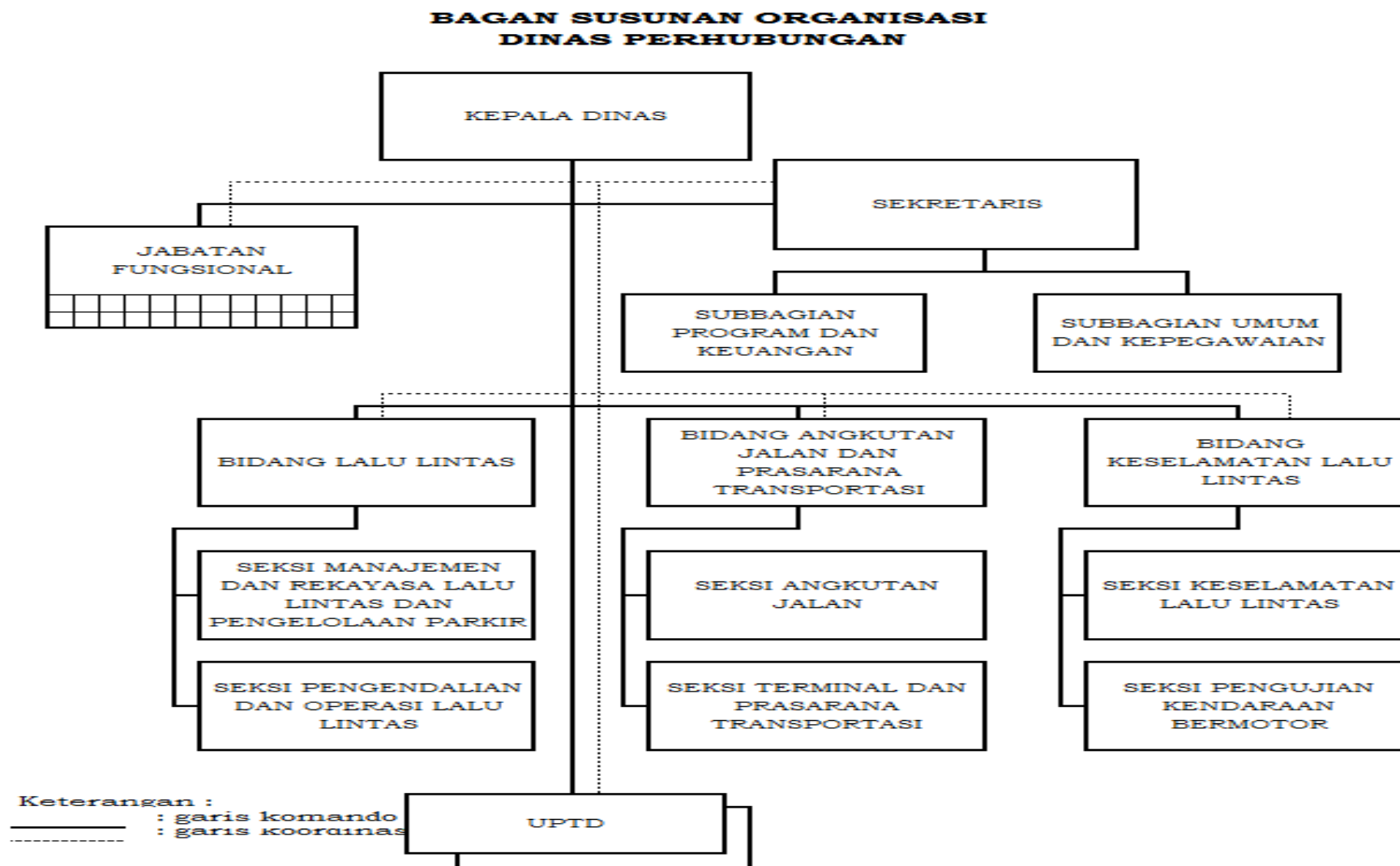
- a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian Perencanaan Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Perhubungan;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Serta Keselamatan Lalu Lintas;
- d. Pengoordinasian Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Serta Keselamatan Lalu Lintas;
- e. Pengembangan Dan Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran;
- f. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan Dan/Atau Nonperizinan Di Bidang Perhubungan;
- g. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas;
- h. Pembinaan Dan Pengoordinasian Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Dinas;
- i. Pengoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan Dinas;

- j. Pengoordinasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Perpustakaan, Kearsipan, Ketatalaksanaan, Dan Budaya Pemerintahan Dinas;
- k. Pengoordinasian Pengelolaan Data Dan Informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- m. Pengoordinasian Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas; Dan
- n. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi;
- e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

b. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat;
2. Perumusan Kebijakan Teknis Kesekretariatan;
3. Penyusunan Program Kerja Dinas;
4. Pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Dinas;
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan Ketatausahaan Dinas;
7. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kepegawaian Dinas;
8. Pengoordinasian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas;
9. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Perpustakaan, Kearsipan, Dokumentasi, Kerjasama Dan Kehumasan Pada Dinas;
10. Fasilitasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Organisasi, Ketatalaksanaan, Dan Budaya Pemerintahan Pada Dinas;
11. Pengoordinasian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi;
12. Fasilitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas;
13. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Di Lingkungan Dinas;

14. Pengoordinasian Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Dinas;
 15. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Sekretariat;
 16. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas;
 17. Pengoordinasian Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas;
 18. Pengoordinasian Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana;
 19. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat; Dan
 20. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- c. Subbagian Program dan Keuangan
- Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Program Dan Keuangan;
 2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi;
 3. Penyiapan Bahan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Strategis;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran;
 5. Penyiapan, Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Dan Pelayanan Data Dan Informasi Dinas;
 6. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Program Dan Kegiatan;
 7. Pengelolaan Keuangan Dinas;

8. Pelaksanaan Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Dinas;
9. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Dinas;
10. Pelaksanaan Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas;
11. Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
12. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan; dan;
13. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Terkait Administrasi Umum Dan Kepegawaian,
3. Pengelolaan Data Kepegawaian Dinas,
4. Penyiapan Bahan Mutasi Pegawai Dinas,
5. Penyiapan Kesejahteraan Pegawai Dinas,
6. Penyiapan Bahan Pembinaan Pegawai Dinas,
7. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dinas,
8. Penyelenggaraan Kepustakaan Dinas,
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas,

10. Pengelolaan Tata Persuratan Dan Kearsipan, Penyiapan Dan Penyelenggaraan Kerjasama Dan Kehumasan Dinas,
11. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Dan Budaya Pemerintahan Pada Dinas,
12. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
13. Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana,
14. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian, Dan
15. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

e. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan parkir dan pengendalian dan operasi lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Lalu Lintas;
2. Pengoordinasian Perencanaan Program Kerja Pada Bidang Lalu Lintas;
3. Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir, Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas;
4. Pengoordinasian Dan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir ;
5. Pengoordinasian Dan Pelaksanaan Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas;

6. Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
 7. Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten;
 8. Pelaksanaan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
 9. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
 10. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Manajemen Rekayasa Dan Lalu Lintas Serta Pengendalian Dan Operasi;
 11. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Lalu Lintas;
 12. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Bidang Lalu Lintas; Dan
 13. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.
- f. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir
- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Parkir,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas,
3. Penyiapan Bahan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Parker,
4. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten,
5. Penyusunan Rencana Umum LLAJ Dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten,
6. Penyusunan Analisis Teknis Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir,
7. Pengelolaan Retribusi Parkir,
8. Pelaksanaan Pengelolaan Data Dan Informasi Retribusi Parkir,
9. Pelaksanaan Perizinan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Parkir,
10. Pelaksanaan Pengadaan SKRD Perparkiran,
11. Pelaksanaan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten,
12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas,
13. Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas,
14. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas,
15. Penyusunan Analisis Dan Usulan Tindakan Alternative Terhadap Situasi Lalu Lintas Yang Bersifat Darurat Dan/Atau Insidentil,
16. Penyusunan Analisis Kebutuhan Dan Rencana Penempatan Fasilitas Perekayasa Lalu Lintas,

17. Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Perekayasaannya Lalu Lintas Yang Meliputi Marka, Rambu, APILL, Flashing Lamp, Traffic Cone, Road Barierr Dan Alat Pembatas Kecepatan,
18. Pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Lajur Maupun Jalur Yang Digunakan Berlalulintas,
19. Pelaksanaan Monitoring Gerakan Lalu Lintas,
20. Pelaksanaan Uji Coba Dan Sosialisasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten,
21. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten,
22. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jalan Kabupaten,
23. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas,
24. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Pengelolaan Perparkiran, Dan
25. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

g. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas

Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas,
3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Operasional,
4. Pelaksanaan Pengamanan Dan Pemanduan Rute Perjalanan Pemerintah Daerah Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pengaturan Kelancaran Lalu Lintas Pada Acara Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah,
5. Pelaksanaan Patroli, Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Di Bidang Perhubungan Dan Pengaturan Lalu Lintas,
6. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Data, Dan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas,
7. Pelaksanaan Penelitian Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dan/Atau Yang Menjadi Isu Kabupaten,
8. Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas,
9. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Operasional Terhadap Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas,
10. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan,
11. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Fungsi Jalan, Kapasitas Jalan, Kelas Jalan Dan Peruntukannya,
12. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Parkir,
13. Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Penyidikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Berdasarkan Peraturan Di Bidang LLAJ,
14. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Pengendalian Dan Operasi,

15. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Seksi Pengendalian Dan Operasi Lalu Lintas, Dan
 16. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- h. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi
- Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, pengelolaan terminal dan prasarana transportasi.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
 2. Pengoordinasian Dan Perumusan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Angkutan Jalan, Terminal Dan Prasarana Transportasi;
 3. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja Pada Bidang Angkutan Dan Prasarana Transportasi;
 4. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Angkutan Jalan;
 5. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Maupun Terminal Barang;
 6. Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan Angkutan Jalan Kabupaten;
 7. Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dan Terminal Barang;

8. Pelaksanaan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dan Pedesaan Dalam Satu Kabupaten;
9. Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Jalan Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Jalan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Satu Kabupaten;
10. Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Pelayanan Perizinan Dan/Atau Nonperizinan Di Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
11. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
12. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi;
13. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi; Dan
14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

i. Seksi Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi. Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan jalan orang dan barang

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Angkutan Jalan,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Angkutan Orang Dan Barang,

3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Angkutan Orang Dan Barang,
 4. Penyusunan Jaringan Trayek Dan Penetapan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Kabupaten,
 5. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Izin Trayek Angkutan Perdesaan,
 6. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Rekomendasi Bagi Angkutan Orang Yang Beroperasi Dalam Kabupaten,
 7. Penyusunan Analisis Teknis Pemberian Izin Trayek Angkutan Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Wilayah Kabupaten,
 8. Penyusunan Analisis Penetapan Wilayah Operasi Dan Kebutuhan Kendaraan Untuk Angkutan Taksi Yang Wilayah Pelayanannya Dalam Satu Kabupaten,
 9. Penyusunan Analisis Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Kabupaten,
 10. Penyusunan Dan Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang Pada Jaringan Jalan,
 11. Pemberian Layanan Rekomendasi Dokumen Muatan Angkutan Barang,
 12. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Angkutan Jalan,
 13. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Angkutan Jalan, Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- j. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi
- Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi. Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Terminal dan

Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan terminal serta prasarana transportasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Terminal Dan Prasarana Transportasi,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terminal Dan Prasarana Transportasi,
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Terminal Dan Prasarana Transportasi,
4. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dan Terminal Barang,
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
6. Pelaksanaan Identifikasi Guna Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
7. Penyusunan Analisis Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
8. Pelaksanaan Pendataan Dan Pemantauan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,

9. Pelaksanaan Pengadaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 10. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 11. Pelaksananan Koordinasi Dengan Instansi Lain Dalam Upaya Peningkatan Dan Pengembangan Prasarana Transportasi Meliputi Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Angkutan Barang, Halte, Fasilitas Bongkar Muat Barang, Fasilitas Penyeberangan, Fasilitas Pejalan Kaki, Rest Area, Fasilitas Difabel Dan Lanjut Usia,
 12. Penyusunan Analisis Teknis Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Bongkar Muat Barang Umum,
 13. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Seksi Terminal Dan Prasarana Transportasi, Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Prasarana Transportasi Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- k. Bidang Keselamatan Lalu Lintas
- Bidang Keselamatan Lalu Lintas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 2. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 3. Pengoordinasian Pelaksanaan Program Kerja Pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 4. Pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 5. Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas;
 6. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Pelaksanaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Jalan Kabupaten;
 8. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Penunjang Keselamatan Dan Alat Pengaman Lalu Lintas Di Jalan Kabupaten;
 9. Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Di Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 10. Pengoordinasian Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 11. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 12. Pembinaan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
 13. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Bidang Keselamatan Lalu Lintas; Dan
 14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugasnya.
1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas
Seksi Keselamatan Lalu Lintas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas,
2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Keselamatan Lalu Lintas,
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Jalan Umum,
4. Pelaksanaan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas,
5. Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas,
6. Pelaksanaan Promosi Dan Kemitraan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas,
7. Pelaksanaan Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas,
8. Perencanaan Dan Penerapan Keselamatan Lalu Lintas,
9. Pemantauan Dan Pengawasan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi,
10. Penyusunan Analisis Kebutuhan Dan Rencana Penempatan Fasilitas Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Dan Alat Pengaman Lalu Lintas,
11. Pelaksanaan Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Meliputi Palang Pintu Keselamatan Jalan Dan Kereta Api, Lampu Penerangan Jalan, Alat Pembatas Tinggi Dan Lebar Lalu Lintas,
12. Pelaksanaan Penyediaan Dan Pemeliharaan Alat Pengaman Lalu Lintas Meliputi Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, Delineator, Paku Jalan, Pulau Lalu Lintas, Pembatas Lalu Lintas, Pita Penggaduh, Jalur Penghentian Darurat,
13. Pelaksanaan Identifikasi Dan Inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Kabupaten,
14. Pengembangan Teknologi Transportasi Guna Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jalan,

15. Pelaksanaan Pemantauan Kondisi Lalu Lintas Berbasis Teknologi,
 16. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Transportasi,
 17. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Teknologi Transportasi,
 18. Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Transportasi,
 19. Pemantauan, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Dan
 20. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.
- m. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor,
 2. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
 4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dan Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor,
 5. Pelaksanaan Inventarisasi Dan Registrasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji,
 6. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor,
 7. Pelaksanaan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor,

8. Pelaksanaan Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor,
9. Pelaksanaan Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengadaan Bahan/Material Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor,
10. Pelaksanaan Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor,
11. Pelaksanaan Pengadaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor,
12. Pelaksanaan Penyusunan Taman Kendaraan,
13. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
14. Pelaksanaan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
15. Pelaksanaan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
16. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Dan Supervisi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor,
17. Pemantauan, Evaluasi, Dan Penyusunan Laporan Kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan
18. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

n. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

o. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional tersebut mempunyai dan

melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		Tenaga Bantuan	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	SD	1	1,92%	1	1,75%
2	SLTP	0	0,00%	0	0,00%
3	SLTA/SMK	24	46,15%	34	59,65%
4	D2	4	7,69%	0	0,00%
5	D3	6	11,54%	4	7,02%
6	D4	3	5,77%	0	0,00%
7	S1	7	13,46%	18	31,58%
8	S2	7	13,46%	0	0,00%
	Jumlah	52	100,00%	57	100,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim I	0
2	Diklat Pim II	1
3	Diklat Pim III	2
4	Diklat Pim IV	5
	JUMLAH	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- c. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Pembina TK I	IV/b	1
3	Penata Tk I	III/d	6
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk I	III/b	7
6	Penata Muda	III/a	3
7	Pengatur Tk I	II/d	10
8	Pengatur	II/c	10
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	7
10	Juru	I/c	1
Jumlah			52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- d. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	Eselon IV A	8
5	Staf	39
JUMLAH		52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

- e. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Tabel 2.5 Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah ideal	Kurang
Penguji	10	10	0
PPNS	1	20	19
D-IV Transportasi Darat	2	8	6
D-IV Keselamatan Jalan	1	8	7
D-III Ahli LLAJ	0	6	6

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN untuk Dinas Perhubungan sebanyak 80 pegawai, kondisi saat ini ada 52 pegawai, masih terdapat kekurangan 28 pegawai. Sumber daya manusia (ASN) yang ada pada saat ini diperdayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan ketugasan dan pelayanan Dinas Perhubungan.

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan parasara yang ada di Dinas Perhubungan ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian		Nilai per 30 Desember 2020
1	Tanah	KIB A	4.025.200.000
2	Perlitan dan Mesin	KIB B	
	< Rp. 300.000,-		404.454.500
	> Rp. 300.000,-		24.623.110.805
3	Gedung dan Bangunan	KIB C	6.345.395.694
4	Jalan, Irigasi, dan bangunan	KIB D	102.875.189.725
5	Aset tetap lainnya	KIB E	2.440.998.333
6	Konstruksi dalam pengerjaan	KIB F	-
7	Barang Inventaris	BI	140.714.349.058
8	Aset Tidak Berujud	ATB	1.265.956.000
Jumlah			282.694.654.115

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Adapun jumlah fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2020

Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Kondisi Awal Sebelum 2016	Penambahan Per Tahun					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
APILL	Unit simpang	20	1	1	1			23
RAMBU	unit	896	236	228	343	300	36	2039
RAMBU PORTABEL	unit	39	19					58
RPPJ	unit	203	36	15	23	17		294
MARKA JALAN	meter persegi	6554,83	1373,43	9300				17228,26
ZEBRA CROSS	unit	29	7					36
PITA PENGGAUDUH	meter persegi	739						739
TROTOAR	meter	14555						14555
GUARDRAIL	mater	372	202	200		141	148	1063
FLASHING LAMP	unit	34	11	7	4	7		63
CERMIN TIKUNG	unit	41	20	57	49	76	10	253
DELINATOR	unit	0			232	450	454	1136
DELINATOR LED	unit	0			11	10		21
PAKU JALAN	unit	0		495	527	826	453	2301
LPJU	unit	3019	388	1564	1177	1251	28	7427

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan ketugasan di bidang Perhubungan masih dibutuhkan sarana dan prasarana berupa:

- kendaraan skylift, mobil tangga, motor tangga, alat pengukur cahaya (luxmeter), alat pengukur ketebalan besi, alat pengaman
- gedung Administrasi dan gedung uji KIR
- Fasilitas gedung : jalan aspal, mushola, kantin, lahan parkir, depo arsip
- Peralatan IT untuk peningkatan kualitas pelayanan
- Mobil untuk operasional pemeliharaan Rambu, Marka, APILL dan perlengkapan jalan lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

a. Sarana Transportasi Umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Bantul

Angkutan Perdesaan								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pasar Bantul-Imogiri	10	10	10	10	0	0	0
2	Pasar Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	0	0	0	0
3	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	0	0	0
4	Dlingo-Rejowinangun	22	0	0	0	0	0	0
5	Pajangan-Bantul	4	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		43	17	17	14	0	0	0

Angkutan Perbatasan								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yogya- Parangtritis	28	29	29	29	29	21	15
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7	5	5
3	Yogya- Sorobayan	10	8	8	8	8	3	3
4	Yogya-Srandakan	26	22	22	6	6	3	2
5	Dlingo-Terminal Giwangan	22	16	16	16	16	14	13
6	Yogyakarta-Petoyan	7	7	7	7	7	15	6
7	Trisik-Giwangan			16	16	16	14	12
JUMLAH		100	89	105	89	89	75	56
AKDP								
No.	Trayek	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yogya-Panggang GK	22	22	22	17	18	13	13
2	Yogya-Parangtritis	26	26	26	26	26	26	26
3	Yogya-Samas	15	15	15	14	14	14	14
4	Yogya-Pandansimo	13	13	13	13	13	13	13
5	Yogya-Wates	21	21	21	16	16	17	17
6	Yogya-Ngentakrejo	8	8	8	8	8	8	8
JUMLAH		105	105	105	94	95	91	91

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

b. Kondisi Transportasi Kabupaten Bantul saat ini

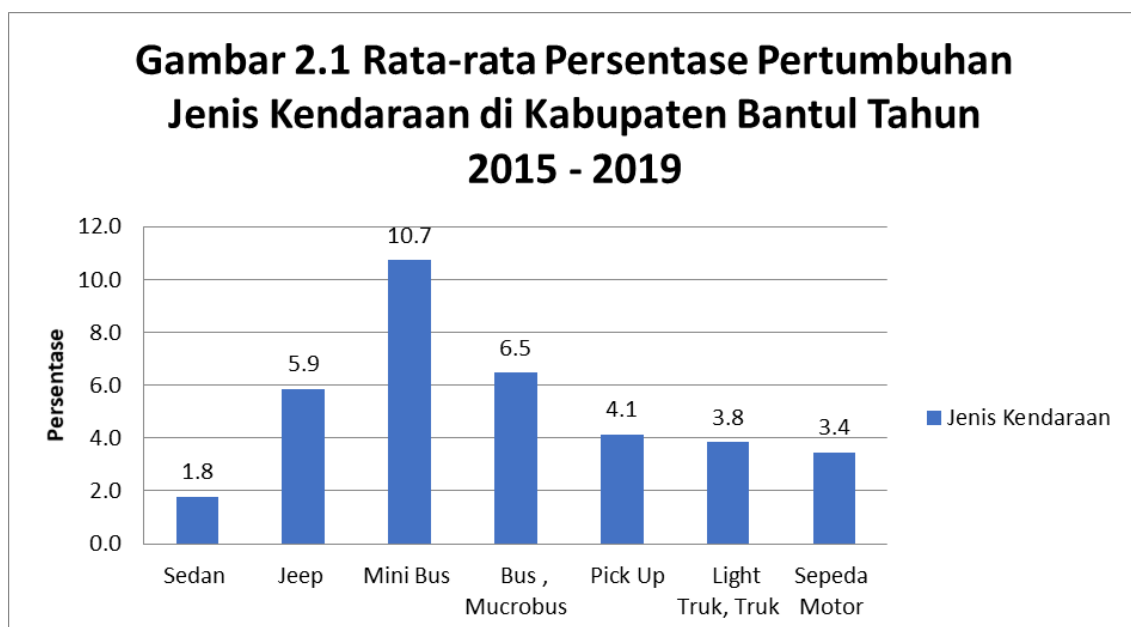
Dalam rangka memantau kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan survei kinerja ruas jalan yang dilaksanakan pada setiap tahun. Kinerja ruas jalan diukur menggunakan besarnya volume kendaraan per kapasitas yang terjadi sebagai perbandingan dari volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Kinerja ruas jalan digunakan sebagai indikator tingkat pelayanan jalan dari ruas jalan tertentu yang menunjukkan tingkat kelancaran sebuah ruas jalan. Kepadatan ruas jalan di Kabupaten bantul mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Bantul yang meningkat secara signifikan sedangkan penambahan panjang jalan di Kabupaten Bantul cenderung terbatas. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 tercatat sebanyak 450.392 unit, dalam lima tahun (tahun 2015 – 2019) terakhir kenaikan rata-rata

kendaraan adalah 4,0% tiap tahunnya. Adapun data laju pertumbuhan kendaraan ditunjukkan pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.9 Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sedan	6.426	6.435	6.578	6.678	6.897
2	Jeep	2.850	3.035	3.244	3.523	3.575
3	Mini Bus	27.733	31.172	35.737	40.458	41.528
4	Bus, Mucrobus	675	759	828	841	864
5	Pick Up	8.260	8.662	9.059	9.762	9.699
6	Light Truk, Truk	3.779	3.933	4.085	4.411	4.386
7	Sepeda Motor	335.168	350.724	364.552	383.938	383.443
Jumlah		384.891	431.720	424.083	449.611	450.392

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun moda kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah microbus, minibus, bus, jeep, pick up.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada periode sebelumnya tersaji dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10 Capaian IKU Periode Tahun 2011-2015

IKU	Sat	Target Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	10	10	10	10	10	13,6	12,3	18,5	6,74	28,07	136	123	185	67	281

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode sebelumnya (tahun 2011 – 2015) yang disajikan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa : IKU dapat tercapai. IKU Dinas Perhubungan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. adanya penegakan hukum oleh kepolisian
- b. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
- c. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
- d. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan aman

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=
														(9/4)* 100	(10)/ (5)	(11)/ (6)	(12)/(7)	(13)/(8)
1	Urusan Perhubungan	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	7,5	208	109	107	100	409

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
1	Urusan Perhubungan	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	7,5	208	109	107	100	409
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	angka	81	81	83	84		81	81	83	65		100	100	100	77	
2.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Tersedianya Barang Cetak	macam	10					10					100				
		Penggandaan	lembar	1500000			23.214		1500000			23.214		100			100	
		Bahan bacaan	bulan	12					12					100				
		Pajak kendaraan	kendaraan	29					29					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		bermotor																
		Honor PPK dll	orang bulan	144					144					100				
		Tabung LPG	buah	2					2					100				
		Jumlah barang cetakan	macam		13					13					100			
		Jumlah Pembayar an Listrik	bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Pembayar an Telepon	bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Pembayar an honor Petugas Jasa Administr asi Keuangan	orang bulan		168	156				168	156				100	100		
		Jumlah jenis alat kantor	jenis		34	35				34	35				100	100		
		Jumlah alat listrik elektronik	jenis		15	6				15	6				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah benda pos			100	1000				100	1000				100	100		
		Jumlah alat kebersihan	lembar		15	15				15	15				100	100		
		Jumlah tabung pemadam kebakaran	tabung		1	0				1	0				100	0		
		Jumlah belanja surat kabar	eksemplar		1440	1604				1440	1604				100	100		
		Jumlah belanja asuransi	kali		36	36				36	36				100	100		
		Jumlah kendaraan KIR	kendaraan		18	18				18	18				100	100		
		Jumlah Belanja STNK	kendaraan		29	29				29	29				100	100		
		Jumlah belanja cetak	jenis			9					9					100		
		Jumlah lembar penggandaan	lembar		6000 0	94290				6000 0	94290				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah tambah daya listrik	unit			1					1					100		
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan				12					12					100	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan				12					12					100	
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan				156					156					100	
		ATK	jenis				15					15					100	
		Komponen Instalasi Listrik	jenis				15					15					100	
		Materai dan Benda Pos	lembar				300					300					100	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis				23					23					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung				0					0					0	
		Bahan Bacaan Langganan surat kabar	bulan				12					12					100	
		Jumlah Belanja Asuransi	unit				0					0					0	
		Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan				16					16					100	
		Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan				33					33					100	
		Barang Cetak	jenis				12					12					100	
		Belanja Tabung Gas Elpiji	tabung				10					10					100	
		Uji Kesehatan COVID-19	kali				10					10					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
2.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman	orang makan	840					840					100				
		Perjalanan Dinas Keluar Daerah	kali	70					70					100				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang kegiatan	360					360					100				
		Makanan dan Minuman perjalanan dinas	orang		800					800					100			
		Koordinasi dalam daerah	orang		501					501					100			
		Koordinasi Luar Daerah	orang		50					50					100			
		Jumlah Makanan dan Minuman	per orang			1256					1256					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang kegiatan			512	210				512	210				100	100	
			orang perjalanan															
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang kegiatan			40	16				40	16				100	100	
			orang perjalanan															
		Jumlah tamu	orang				855					855					100	
		Laporan hasil rapat																
2.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tenaga Kontrak	orang bulan	517			50		517			50		100			100	
		Jumlah jasa keamana	orang bulan			624					624					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		n																
		Jumlah pakaian kerja harian	buah			125					125					100		
		Jumlah tenaga teknis pendukun g	orang		572					572					100			
		Jasa Keamama nan Kantor	orang bulan				36					36					100	
		Jasa Kebersiha n	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Pengadmi nistrasi Umum	orang bulan				60					60					100	
		Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	orang bulan				204					204					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Tenaga Pembantu Pengadmi nistrasi Keuangan dan Aset	orang bulan				36					36					100	
		Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Pelaksanan Wasdal Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	orang bulan				96					96					100	
		Tenaga Pembantu Pelaksanan Retribusi Terminal	orang bulan				24					24					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	orang bulan				36					36					100	
		Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendali	orang bulan				12					12					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		ian Parkir																
		Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Pakaian Kerja Lapangan	buah				427					427					100	
		Tenaga Pembantu Pengujian	orang bulan				60					60					100	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	angka	92	95	100	100		75	75	92,5	67		82	79	93	67	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
3.1	Pengadaa n Kendaraan Dinas/O perasiona l	Pengadaa n Kendaraa n DinasOpe rasional	unit	1					1					100				
		Jumlah kendaraa n bermotor	unit			3					3					100		
3.2	Pengadaa n Peralatan dan Perlengka pan	Perlengka pan gedung kantoor	buah	16					16					100				
		Jumlah peralatan dan perlengka pan	mcam		13					13					100			
		Jumlah peralatan keselamat an diri	jenis			6					6					100		
		Jumlah perkakas bengkel service	jenis			4					4					100		
		Jumlah meubelair	jenis			12					12					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah rak arsip	unit			3					3					100		
		Jumlah printer	unit			7					7					100		
		Jumlah UPS	unit			10					10					100		
		Jumlah tangga	unit			1					1					100		
		Jumlah genset	unit			1					1					100		
		Jumlah wireless	unit			1					1					100		
		Jumlah karpet	unit			1					1					100		
		Jumlah kipas angin	unit			2					2					100		
		Jumlah AC	unit			7					7					100		
		Jumlah trolley	unit			1					1					100		
		Jumlah hoiz	unit			1					1					100		
		Jumlah software	aplikasi			1					1					100		
		Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB)	unit			1					1					100		
		Jumlah computer	unit			1					1					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah gorden	meter			11					11					100		
		Meubelair	jenis				2					2					100	
		Air Furifier	buah				1					1					100	
		Meja rapat pejabat	buah				0					0					0	
		Kursi rapat pejabat	buah				20					20					100	
		Printer dot matrix	unit				1					1					100	
		Pintu Sliding kacamus hola	buah				1					1					100	
		Telepon PABX antar bidang	buah				0					0					0	
		Genset	buah				0					0					0	
		Personal Komputer	unit				1					1					100	
3.3	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	bulan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
			gedung				3					3					100	
		Jumlah pemeliharaan gedung	bulan		12					12					100			
			gedung			2					2					100		
3.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	unit	26					26					100				
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	kendaraan		29					29					100			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	unit			32					32					100		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit				8					8					100	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit				8					8					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit				18					18					100	
3.5	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12					12					100				
		Jumlah pemeliharaan AC	unit		10	10				10	10				100	100		
		Jumlah pemeliharaan computer	unit		20	15				20	15				100	100		
		Jumlah pemeliharaan genset	unit		2	1				2	1				100	100		
		Jumlah pemeliharaan repeater	unit			4					4					100		
		Jumlah pemeliharaan mebeler	kali		2	2				2	2				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pemeliharaan printer	unit		36					36					100			
		Pemeliharaan AC dan Wireless	unit				10					10					100	
		Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit				20					20					100	
		Pemeliharaan Repeater	unit				4					4					100	
		Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali				2					2					100	
		Pemeliharaan Genset dan Compressor	unit				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	angka	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian seragam, atribut, warepack, rompi juru parkir, topi juru parkir	buah	1650					1650					100				
4.2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja	buah		1062					1062					100			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	angka	100	100	100	100		78	125	0	0		78	125	0	0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
5.1	Pendidikan, Pelatihan , Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Bimbingan teknis peraturan perundangan	kegiatan	2					2					100				
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang			100					100					100		
		Jumlah diklat perhubungan	orang			5					5					100		
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang				80					80					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang				5					5					100	
5.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat perhubungan	orang		5					5					100			
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang		100					100					100			
		Jumlah sosialisasi	orang		100					100					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Angka nilai evaluasi kinerja	angka	79	79	81	82		80	79	80,56 25	64		101	100	99	78	
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	10					10					100				
		Jumlah laporan	dokumen			10					10					100		
		Dokumen Perencanaan	dokumen				3					3					100	
		Laporan Keuangan dan Aset	laporan				7					7					100	

[illegible]

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
	Jumlah pemeliharaan alat PKB		unit		10					10					100			
		Servis alat uji	kali				1					1					100	
		Kalibrasi	kali				1					1					100	
7.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Sewa gedung kantor	kali	1					1					100				
		Jumlah sewa gedung PKB	lokasi		1					1					100			
7.3	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/Pelabuhan	Pemeliharaan terminal/pelabuhan	bualan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
7.4	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas dan marka	bulan	12					12					100				
		Jumlah pemeliharaan APILL	unit		18					18					100			
		Jumlah rambu yang terpelihara	unit		100					100					100			
		Jumlah flashing yang terpelihara	unit		5					5					100			
		Jumlah pemeliharaan kerb jalan	meter		150					150					100			
		Jumlah APILL yang terpelihar	unit			19					19					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		a																
		Jumlah rambu yang terpelihara	unit			80					80					100		
		Jumlah Flashing Lamp yang terpelihara	unit			10					10					100		
		Panjang pemeliharaan kerb	meter			318					318					100		
		Pemeliharaan APILL	unit				14					14					100	
		Pemeliharaan Rambu	unit				80					80					100	
		Pemeliharaan Flashing Lamp	unit				10					10					100	
		Pemeliharaan Kerb Jalan	meter				0					0					0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase angkutan umum yang layak jalan	persen	80,25	80,5	80,75	81		80,8	80,25	80,5	80,5		101	100	100	99	
8.1	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Operasional PKB	bulan	12					12					100				
8.2	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan angkutan	Kegiatan survey dan studi	kegiatan	16					16					100				
		Jumlah study database	dokumen			2					2					100		
		Jumlah survey				2					2					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah survey angkutan			1					1					100			
		Jumlah Perbup			1					1					100			
		Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen				2					2					100	
		Dokumen Survey Angkutan	dokumen				2					2					100	
8.3	Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	Koordinasi Perijinan	kali	4					4					100				
		Jumlah koordinasi internal penanganan perijinan perhubungan	kali		4					4					100			
		Jumlah koordinasi perijinan	kali			4					4					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan				4					4					100	
8.4	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan	Kegiatan Sosialisasi	kegiatan	6					6					100				
		Jumlah sosialisasi angkutan	orang		500					500					100			
		Jumlah kegiatan sosialisasi	kali			6					6					100		
		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan				6					6					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8.5	Pembinaan Operasional LLAJ	Terciptanya kesadaran berlalulintas	kegiatan	7					7					100				
8.6	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah terminal yang terpeliharaan	lokasi			5					5					100		
		Jumlah lokasi pemeliharaan terminal dan TPR	lokasi		5					5					100			
		Pemeliharaan terminal	lokasi				5					5						
		Media Sosialisasi	unit				1					1						

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan simpul transportasi berupa halte, terminal dan park and ride	persen	42	53	63	68		42	53	63	68		100	100	100	100	
9.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Pengadaan halte	unit	4	5				4	5				100	100			
		Jumlah halte yang terpasang	unit			4					4					100		
		Pembangunan Halte	unit				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan n LPJU	persen	n/a	31	35	40		0	43,5	32,75	18,75		0	140	94	47	
10.1	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	bulan	12					12					100				
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	persen		93					93					100			
11.1	Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	unit			2200					2200					100		
		Jumlah reabilitas LPJU	unit			10					10					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah pengecatan tiang LPJU	unit			72					72					100		
		Jumlah penggantian armatur	unit			50					50					100		
		Jumlah penggeseran tiang LPJU	unit			20					20					100		
		Jumlah dokumen perencanaan	dokumen			2					2					100		
		Pemeliharaan LPJU	unit				2000					2000					100	
		Rehab Tiang LPJU	unit				33					33					100	
		Pengecatan Tiang LPJU	unit				100					100					100	
		Penggantian Armatur	unit				20					20					100	
		Penggeseran Tiang LPJU	unit				40					40					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemeliharaan LPJU High Mast	unit				2					2					100	
12	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen	85,5	43,5	86,5	87		88,62	43,5	83,875	67		104	100	97	77	
12.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Alat uji emisi, deselometer, alat timbang portable	unit	4					4					100				
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	unit		3					3					100			
12.2	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah buku uji	buku		19000					19000					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah cetak logo daerah	lembar		1900 0					1900 0					100			
		Jumlah stiker tanda uji	lembar		3800 0					3800 0					100			
		Jumlah blangko permohonan uji	lembar		3800 2					3800 2					100			
		Jumlah kuitansi pengujian	buku		600					600					100			
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	kali		300					300					100			
		Jumlah Plat Uji	buah		3800 0	40000				3800 0	40000				100	100		
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	kali		300					300					100			
		Jumlah kartu pemeriksaan	lembar		1583 3					1583 3					100			
		Jumlah cetak stiker	buah			40000					40000					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		tanda uji																
		Jumlah cetak blangko permohonan uji	lembar			15000					15000					100		
		Jumlah cetak surat penetapan retribusi	lembar			40000					40000					100		
		Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	lembar			5000					5000					100		
		Jumlah smart card PKB	buah			13000					13000					100		
		Jumlah cetak surat keterangan tidak lulus uji	lembar		100	50				100	50				100	100		
		Jumlah upgrade software	unit		1	2				1	2				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
			kali															
		Jumlah kajian	dokumen			2					2					100		
		Jumlah printer smart card	unit			1					1					100		
		Jumlah card reader	unit			1					1					100		
		Jumlah printer L310 Epson	unit			1					1					100		
		PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah				5200					5200					100	
		Surat penetapan retribusi	lembar				40000					40000					100	
		Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar				10000					10000					100	
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar				20000					20000					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan				250					250					100	
		Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen				1					1					100	
		Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali				1					1					100	
		Alat Uji Slip Tester/E misi Solar	unit				1					1					100	
		Pemeliharaan Sipentol	kali				1					1					100	
		Pos (Pra Uji) Pengambilan	gedung				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Gambar Fisik/ Pas Foto																
		Kamera Smart Card	unit				4					4					100	
		Exhaust Fan Ruang Uji	unit				8					8					100	
13	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen	n/a	10	12	14		0	10	12	18,75		n/a	100	100	134	
13.1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu lalu lintas	unit	202					202					100				
13.2	Pengadaan Marka Jalan	marka	meter persegi	2010					2010					100				
13.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Guardrail	meter	180					180					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah paku jalan	unit		500					500					100			
		Jumlah delinator	unit		150					150					100			
		Jumlah pagar pengaman jalan	meter			315					315					100		
		Jumlah paku jalan yang terpasang	unit			726					726					100		
		Jumlah delinator yang terpasang	unit			250					250					100		
		Jumlah delinator solar cell yang terpasang	unit			10					10					100		
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter				148					148					100	
		Paku Marka	unit				543					543					100	
		Deliniator	unit				454					454					100	
13.4	Pengadaan APILL	APILL	unit	1					1					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
13.5	Pengadaa n Flashing Lamp	Flashing Lamp	unit	5					5					100				
		Jumlah Flashing lamp	unit		5					5					100			
		Jumlah pelican crossing	unit		1					1					100			
		Jumlah cermin tikungan	unit		19					19					100			
		Jumlah flashing lamp yang terpasang	unit			7					7					100		
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	unit			70					70					100		
		Flashing Lamp Terpasang	unit				0					0					0	
		Cermin Tikungan Terpasang	unit				9					9					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
13.6	Pengadaa n Lampu Penerang an Jalan	Lampu Penerang an Jalan Umum	unit	1383					1383					100				
		Jumlah Lampu Penerang an Jalan Umum	unit		560					560					100			
		Jumlah LPJU Jalan Desa	unit		377					377					100			
		Jumlah LPJU yang terpasang	unit			1096					1096					100		
		Jumlah Dokumen Perencan aan	dokume n			6					6					100		
		Jumlah Dokumen Pengawas an	dokume n			6					6					100		
		Jumlah Dokumen masterpla n LPJU Kab Bantul	dokume n			1					1					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		LPJU LED	unit				8					8					100	
		LPJU Jalan Desa	unit				4					4					100	
		LPJU Tenaga Surya	unit				4					4					100	
		LPJU DAK	unit				0					0					0	
		Dokumen Perencan aan	dokume n				8					8					100	
		Dokumen Pengawas an	dokume n				3					3					100	
		LPJU BKK	unit				10					10					100	
14	Program Pengemb angan Kelalulint asan	Persentas e penuruna n pelanggar an lalu lintas	persen		10	12	14	16	10	12	14	16		100	100	100		
14.1	Peningka tan Disiplin Masyarak atdalam Berlalu Lintas	Jumlah peserta sosialisasi pelajar	orang		700					700					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah peserta safty riding	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event simpatik	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event pembinaan parkir	orang		800					800					100			
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	orang		450					450					100			
		Jumlah kegiatan pelajar pelopor	orang		225					225					100			
		Jumlah pembinaan parkir	orang			800					800					100		
		Jumlah kegiatan Sosialisasi pelajar	orang			225					225					100		
		Jumlah sosialisasi pelajar	orang			700					700					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah safety riding	orang			300					300					100		
		Jumlah event simpatik	orang			300					300					100		
		Jumlah pembinaa n operation al LLAJ	kali			450					450					100		
		Laporan Pembinaa n Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan				4					4					100	
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Berlalu- lintas	laporan				0					0					0	
		Laporan Sosialisas i Disiplin Berlalu- lintas untuk 850	laporan				0					0					0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		pelajar																
		Laporan Safety Riding	laporan				0					0					0	
		Laporan Event Simpatik	laporan				0					0					0	
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan				1					1					100	
14.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah study dan survey manajemen rekayasa lalu lintas	dokumen		3					3					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah Survey Lalu Lintas	dokumen			2					2					100		
		Jumlah dokumen kajian	dokumen			4					4					100		
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen				2					2					100	
14.3	Pengembangan Fasilitas Perekayaan Lalu Lintas	Jumlah APILL yang terpasang	paket		1					1					100			
		Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	unit		494					494					100			
		Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	meter		2000					2000					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah cevron LED solar panel	lokasi		5					5					100			
		Jumlah Rood tariff yang terpasang	unit		20					20					100			
		Jumlah RPPJ yang terpasang	unit		22					22					100			
		Luas marka parkir yang terpasang	unit		500					500					100			
		Luas marka dalam kota yang terpasang	unit		870					870					100			
		Luas marka kota yang terpasang	meter persegi		1000					1000					100			
		Jumlah Rambu	unit			220					220					100		
		Jumlah RPPJ	unit			17					17					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter			2735					2735					100		
		Jumlah papan himbauan keselamatan rawan lalu lintas	unit			79					79					100		
		Jumlah APILL	lokasi			2					2					100		
		Jumlah Road Barrier	unit			83					83					100		
		Marka Parkir	meter persegi			1000	500				1000	500				100	100	
		Marka dalam kota	meter persegi			1200	949				1200	949				100	100	
		Marka luar kota	meter persegi			1200	900				1200	900				100	100	
		Jumlah marka penyeberangan	meter persegi			1000					1000					100		
		Jumlah marka jalan	meter persegi			500					500					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pita kejut	meter persegi			400					400					100		
		Jumlah traffic cone	unit			150					150					100		
		Jumlah papan informasi tariff parkir	unit			18					18					100		
		Rambu Lalu Lintas	unit				0					0					0	
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit				0					0					0	
		Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter				2735					2735					100	
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit				0					0					0	
		APILL	unit				0					0					0	

[illegible]

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka					80					80					100
15.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen					3					3					100
15.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	dokumen					3					3					100
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka					80					80					100
16.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali					14					14					100
		Penerima tunjangan kinerja	orang					50					50					100
16.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan	dokumen					2					2					100
		Laporan Evaluasi	dokumen					1					1					100
		Laporan Keuangan dan Aset	dokumen					4					4					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka					100					100					100
17.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang					80					80					100
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang					6					6					100
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka					85					85					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=
														(9/4)* 100	(10)/(5)	(11)/(6)	(12)/(7)	(13)/(8)
18.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis					8					8					100
18.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis					4					4					100
18.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis					18					18					100
		tabung gas elpigi	tabung					6					6					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
18.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	jenis					5					5					100
		Penggandaan	lembar					31077					31077					100
18.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundingan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	bulan					3					3					100
18.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen					25					25					100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalanan					4					4					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalanan					4					4					100
		Tamu	Orang					200					200					100
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka					85					85					100
19.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	dokumen					1					1					100
		Materai dan Benda Pos	lembar					545					545					100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
19.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	kali					12					12					100
		Telepon	kali					12					12					100
19.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	jenis					35					35					100
		Bolpoint (semula 96 menjadi 280 buah)	buah					184					184					100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis					6					6					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		pan																
		Refill cartridge (semula 20 menjadi 40 buah)	buah					20					20					100
		Stopmap kertas (semula 3 pak menjadi 7 pak)	pak					4					4					100
		Stopmap snelhecter (semula 60 menjadi 200 buah)	buah					140					140					100
		Tabung Pemadam Kebakara n	tabung					2					2					100
19.4	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Laporan administr asi umum	dokume n					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Laporan keamana n dan ketertiban lingkungan kantor	dokume n					1					1					100
		Laporan kepegawai an	dokume n					1					1					100
		Laporan perawata n dan pemelihar aan kendaraa n	dokume n					1					1					100
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan					176					176					100
		Premi asuransi	bulan					12					12					100
20	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentas e pemenuh an sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
20.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lingkungan	Jasa Servis Bus	unit					1					1					100
		Jasa Servis kendaraan	unit					2					2					100
		KIR Kendaraan	unit					18					18					100
		Pajak Kendaraan	unit					29					29					100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit					18					18					100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit					9					9					100

[illegible]

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
	LINTAS DAN ANGKUT AN JALAN(L LAJ)																	
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	persen					44					44					100
21.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Halte	unit					2					2					100
21.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cermin Tikungan	unit					23					23					100
		Delinator	unit					10					10					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Flashing Lamp	unit					1					1					100
		Laporan Hasil Survei Perlengkapan Jalan	dokumen					1					1					100
		LPJU	unit					686					686					100
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter					24					24					100
		Paku Jalan	unit					10					10					100
21.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Laporan pemeliharaan LPJU	dokumen					1					1					100
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan LPJU	jenis					5					5					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
22	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81.25					81.25					#VALUE!
22.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Laporan hasil retribusi terminal	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan terminal	unit					5					5					100
		Pengurangan kembali terminal Tipe C Imogiri	meter 3					124601					124601					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=
														(9/4)* 100	(10)/ (5)	(11)/ (6)	(12)/(7)	(13)/(8)
23.1	Pengenda lian dan Pengawas an Ketersedi aan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupate n/ Kota	Dokumen Survey Angkutan	dokume n					2					2					100
		Laporan Data angkutan	dokume n					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
24	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100
24.1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	dokumen					5					5					100
		Laporan Wasdal Angkutan	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=
														(9/4)* 100	(10)/(5)	(11)/(6)	(12)/(7)	(13)/(8)
25	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
25.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	dokumen					4					4					100
		Laporan Perijinan Fasilitas Sarana dan	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Prasarana di Bidang Angkutan																
26	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen					87,5					87,5					100
26.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji	paket					1					1					100
		Card Reader Smart Card	buah					1					1					100
		Clienting Kit Printer Smart Card	paket					6					6					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Kartu pemeriksaan	lembar					19650					19650					100
		Laporan keuangan bulanan retribusi	lembar					52860					52860					100
		Laporan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	dokumen					4					4					100
		Pemeliharaan Sipentol	paket					2					2					100
		PNBB Bukti Uji baru (Smart Card PKB)	lembar					9900					9900					100
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	dus					20					20					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Stiker gesek mesin pengujian kendaraa n bermotor	buah					1265					1265					100
		Stopmap	lembar					1600 0					16000					100
		Surat keterangan n tidak lulus uji	buah					1000 0					10000					100
		Surat penetapa n retribusi	lembar					1800 0					18000					100
		Upgrade Software dan Hardware	paket					1					1					100
26.2	Pemeliha raan Sarana dan Prasaran a Pengujian Berkala Kendaraa n Bermotor	Servis alat uji	kali					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
27	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	persen					16					16					100
27.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian	dokumen					1					1					100
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen					2					2					100
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
27.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL	unit					0					0					0
		Laporan pemeliharaan APILL dan rambu	dokumen					1					1					100
		Marka dalam kota	meter2					77					77					100
		Marka luar kota	meter2					77					77					100
		Marka Parkir	meter2					77					77					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/ (7)	(18)= (13)/ (8)
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit					0					0					0
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	jenis					5					5					100
		Pengadaan Sparepart APILL	unit					13					13					100
		Pengecatan kerb jalan	meter2					0					0					0
		Pita Penggadhuh	meter2					355					355					100
		Rambu Lalu Lintas	unit					134					134					100
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit					7					7					100
		Tali Pembatas	meter					0					0					0

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Arus Lalu Lintas																
27.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan Event Simpatik	dokumen					1					1					100
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Lalu-lintas	dokumen					1					1					100
		Laporan kegiatan pengendalian dan operasi	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan pembinaan operasioa n LLAJ	dokume n					1					1					100
		Laporan pembinaan n parkir	dokume n					4					4					100
		Laporan Safety Riding	dokume n					1					1					100
		Laporan Sosialisas i disiplin lalu lintas	dokume n					3					3					100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Tabel 2.12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati
2. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi
3. Berfungsinya secara optimal fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
4. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
2. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
4. Menurunnya jumlah angkutan umum

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1***)	Belanja Tidak Langsung	4.725.872.000	4.476.361.582	3.457.904.687	3.617.587.547		4.215.917.242	4.086.681.283	3.357.430.506	3.121.433.830		89,21	91,29	97,09	86,28	
2***)	Belanja Langsung															
3***)	Belanja pegawai	1.457.450.000	1.066.860.000	1.230.775.000	1.270.595.000	6.156.768.868	1.411.245.000	1.036.025.000	1.206.180.000	1.260.990.000	5.471.291.367	96,83	97,11	98,00	99,24	88,87
4***)	Belanja Barang Jasa	4.946.140.500	6.028.328.010	7.003.837.200	4.291.228.400	5.152.511.292	4.584.305.164	5.362.426.872	6.811.112.615	4.241.908.409	5.099.663.271	92,68	88,95	97,25	98,85	98,97
7****)	Belanja Modal	23.283.510.000	18.092.525.500	26.951.637.300	3.298.571.500	14.143.488.708	22.372.098.572	17.512.548.277	25.685.130.697	3.240.147.500	13.839.736.200	96,09	96,79	95,30	98,23	97,85

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2016 – 2021), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,68%. Belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp.8.860.394.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.8.743.045.909,00, atau sebesar 98,68%.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,68% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah **efektif** dalam melaksanakan program kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

1. Adanya komitmen pimpinan
2. Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik
3. Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai
4. Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik
5. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah

1. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan yang masih rendah
2. Belum tersedianya database yang memadai

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Capaian indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 yang terendah adalah persentase angkutan umum yang laik jalan dan persentase ketersediaan LPJU. Selain itu pembangunan dari aspek transportasi yang terjadi di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

- a. Tingginya angka kecelakaan

Tingginya angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bantul tidak semata-mata disumbang oleh kecelakaan yang terjadi di ruas jalan kewenangan Kabupaten Bantul, namun juga ruas jalan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat, sehingga ke depan bisa direncanakan untuk ada perencanaan penanganan kecelakaan secara terpadu.

b. Pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir

Badan jalan yang beralih fungsi menjadi lahan parkir merupakan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantul disebabkan oleh :

1. meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang memicu pergerakan lalu lintas secara langsung berdampak pada kenaikan jumlah tempat parkir yang dibutuhkan;
2. pusat kegiatan baru (*trip attraction*) yang terus tumbuh menimbulkan peningkatan permintaan perjalanan (*traffic demand*) dan permintaan parkir (*parking demand*) hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bantul; dan
3. pengembang pusat kegiatan tidak memperhatikan adanya kebutuhan parkir sehingga pelaku usaha tidak menyediakan tempat parkir di dalam lokasi pusat kegiatan (*off street*) sehingga memicu adanya parkir di badan jalan (*on street*).

Dalam menangani parkir di badan jalan ini Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa upaya penertiban dan pendidikan kepada masyarakat dan juru parkir agar pelaksanaan parkir di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Namun kendala yang dihadapi dalam penertiban tersebut adalah adanya aspek sosial seperti kurang tertibnya juru parkir dan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan parkir.

c. Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan

Jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat namun tidak disertai laju penambahan ruas jalan menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul. Data laju kendaraan sebesar 4,032%

d. Menurunnya jumlah angkutan umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebanyak 69,7% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah angkutan yang ada pada tahun 2020 sebanyak 56 unit dengan 7 trayek sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 183 unit kendaraan dengan 13 trayek.

e. LPJU yang sebaran pemasangannya belum sesuai dengan masterplan/perencanaan

f. Belum adanya regulasi berupa rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

g. Kurangnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penambahan trayek ke bandara

b. Rencana trase kereta api

c. Rencana pembangunan jalur JOR

Dengan adanya Jogja Outer Ring Road, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan JORR (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke JORR), Terminal Tipe C di Imogiri, Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten).

d. Pengembangan trayek angkutan perkotaan Yogyakarta

e. Konektivitas JJLS

Dengan adanya Rencana Strategis Pansela (JJLS), rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

adalah Rest Area Poncosari (Bekas Terminal Pandansimo), pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Pansela (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses menuju Pansela).

f. Jalan Tol Jogja – Solo

Adanya Jalan Tol Jogja – Solo, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah pembangunan Rest Piyungan, pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Jalan Tol Jogja - Solo (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke Jalan Tol Jogja - Solo)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah di atas, permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya angka keselamatan lalu lintas	Tingginya kecelakaan lalu lintas	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas 2. Masih banyaknya anggota masyarakat yang perlu disosialisasi terkait aturan keselamatan lalu lintas 3. Masih kurangnya sarana perlengkapan jalan
		Rendahnya tingkat pelayanan angkutan	1. Jaringan pelayanan angkutan yang perlu ditingkatkan 2. konektifitas antarmoda angkutan umum yang perlu ditingkatkan 3. masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum 4. adanya lonjakan peningkatan jumlah kendaraan pribadi 5. pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih perlu ditingkatkan 6. perlunya peningkatan sarana dan prasarana angkutan umum dan barang 7. perlunya peningkatan kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang
		Masih rendahnya Pengendalian operasional	1. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan umum dan angkutan barang terkait kelas jalan 2. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan barang untuk

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			dapat sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku
		Kurangnya kepatuhan pengendara angkutan umum dan/atau barang yang membahayakan pengguna jalan lain	Masih perlunya peningkatan kemampuan tertib berlalu lintas
		Terjadinya Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor	1. Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan 2. Masih perlu ditingkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
		Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruasa jaan yang bukan peruntukannya	1. Belum adanya perencanaan kawasan parkir di Kabupaten Bantul 2. Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya) 3. Masih adanya parkir yang tidak berijin
			Produk penelitian sektor perhubungan masih terbatas

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”

MISI :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istiwewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup,	Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu	Masih kurangnya tenaga teknis perhubungan

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana	lintas	Kurangnya Sarana kendaraan husus untuk pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya SDM bersertifikat dalam pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS
			Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah berumur sehingga sering terjadi kerusakan yang menghambat operasional PKB
		Adanya pembangunan JJLS dan pembangunan Yogyakarta International Airport membutuhkan dukungan prasarana lalu lintas	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan Rencana Daerah Keselamatan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berprestasi, menengah- Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda

pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Integrasi Antar Moda Dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Transportasi Untuk Mendukung Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah;
2. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi Dengan Memanfaatkan Teknologi Yang Tepat Guna Dan Tepat Sasaran Didukung Oleh SDM Yang Profesional Serta Antisipatif Terhadap Potensi Kebencanaan;
3. Memberikan Dukungan Teknis Dan Administrasi Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi Didukung Oleh Kualitas Dan Kompetensi SDM Operator Dan Pelaksana Industri Transportasi Yang Berdaya Saing Internasional, Mandiri Dan Produktif;
4. Melanjutkan Konsolidasi Melalui Restrukturisasi, Reformasi Dan Penguatan Di Bidang Peraturan, Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur Dan Penegakan Hukum Secara Konsisten;
5. Mewujudkan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Inovasi Teknologi Transportasi Yang Tepat Guna, Tepat Sasaran Dan Ramah Lingkungan Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim.

3.3.1.1 Isu Strategis Kementerian Perhubungan

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

- a. konektivitas Poros Maritim;
- b. konektivitas Multimoda;
- c. keselamatan Transportasi; dan
- d. transportasi Perkotaan.

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	1. <i>Ontime Performance</i> Layanan Transportasi 2. Indeks

No	Misi Kementrian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan				kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan 2. Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompetensi
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementrian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori “Sangat Baik”	1. Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” 3. Indeks RB Kementrian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi	Tingkat penggunaan teknologi transportasi	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor

No	Misi Kementrian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	yang ramah lingkungan		transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2020

Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A	Terwujudnya Konektivitas Nasional		
	Penguatan Jejaring Transportasi Eksisting	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Pembangunan simpul transportasi baru
		Belum adanya stakeholder yang tertarik akan pengembangan angkutan perdesaan	Adanya rencana jaringan angkutan umum perdesaan
	Perluasan Jaringan Transportasi	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum
	Penerapan <i>Traffic Demand Manajemen</i> pada semua layanan transportasi	Belum adanya dokumen perencanaan <i>Traffic Demand Manajemen</i>	Adanya pelayanan angkutan umum yang beroperasi namun belum terintegrasi
	Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
B	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan		

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Mengoptimalkan SDM Pelayanan sarana dan prasarana	Moratorium PNS dan keterbatasan usaha peningkatan kapasitas SDM perhubungan	Pengadaan pegawai non ASN
		Kurangnya minat ASN dalam meningkatkan kualifikasi keahlian perhubungan	Penyusunan program pengembangan SDM transportasi
	Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difable, dan lansia	Keterbatasan teknologi dalam penanganan sistem transportasi dan belum adanya perencanaan terintegrasi dalam pemenuhan transportasi yang ramah gender, difable dan lansia.	Pembuatan prasarana angkutan umum dan pejalan kaki yang ramah gender, difable dan lansia
	Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana	Keterbatasan SDM bersertifikat yang paham akan standar pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Adanya <i>quality control</i> terhadap standar pelayanan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perhubungan
			Pengukuran tingkat kepuasan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
C	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan		
	Penegakkan hukum	kurangnya budaya tertib lalu lintas oleh pengguna jalan	Penegakan hukum atas aturan yang berlaku
	Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Peningkatan upaya kampanye lalu lintas dan sosialisasi keselamatan transportasi
		Belum adanya sistem	Adanya sistem

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		aplikasi terpadu dalam pengaduan terhadap gangguan keselamatan	pengaduan pelayanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan dari sektor perhubungan
	Pembatasan usia sarana dan prasarana	Keterbatasan peran internal dalam pengawasan terhadap sarana dan prasarana	pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan terhadap usia angkutan umum, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi prasarana jalan.
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum optimalnya fungsi prasarana lalu lintas	Dukungan kebijakan Pemerintah dan stakeholder terkait dengan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
	Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi	Sarana pengujian yang telah berusia lebih dari 10 tahun menyebabkan kemungkinan bias dalam hasil pemeriksaan PKB, kurangnya sarana dalam peraian kelengkapan jalan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian
	Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan	Kurangnya sarana, prasarana dan bahan material dalam perbaikan fasilitas transportasi	Penyusunan dan penerapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan
	Edukasi Keselamatan Transportasi	Rendahnya pemahaman masyarakat akan peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan	Sosialisasi peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan kepada

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			masyarakat

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3.2 Renstra Dinas Perhubungan DIY

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 untuk urusan perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun isu strategis, tujuan, indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan DIY adalah sebagai berikut.

1. Isu Strategis

a. Ketimpangan wilayah

Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah tersendatnya mobilitas barang dan jasa baik dalam daerah maupun antar daerah. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan perdagangan, jika mobillitas tersebut kurang lancar akan menyebabkan kelebihan produksi namun tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Dampak dari ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung semakin tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Langkah untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruhan pelosok wilayah. Prasarana perhubungan tersebut meliputi

fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut. Selain itu pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan fasilitas telekomunikasi. Ketimpangan wilayah menjadi isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY. Sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

b. Transportasi Umum (massal)

Masalah yang muncul dalam transportasi adalah kebutuhan (*demand*) akan pergerakan jauh lebih besar dibanding prasarana yang tersedia (*supply*). Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun prasarana sesuai kebutuhan, mengurangi pergerakan dan gabungan dari keduanya. Untuk mengurangi masalah transportasi yang ada di DIY yang pertama dilakukan ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana angkutan umum yang ada, sebagai langkah *pull strategy* atau strategi “menarik” pengguna angkutan umum. Langkah ini harus diiringi dengan *push strategy* atau strategi yang mendorong masyarakat agar naik angkutan umum, dengan cara yang bersifat “memaksa”, seperti mengembangkan kawasan bebas kendaraan bermotor kecuali angkutan umum, menaikkan tarif parkir, menaikkan pajak kendaraan pribadi, dan lain-lain.

c. Yogyakarta International Airport (YIA)

Bandara baru merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Bandara YIA termasuk dalam 10 prioritas nasional yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperlukan rencana yang matang dalam pengembangan infrastruktur pendukung wilayah untuk mengantisipasi beroperasinya bandara baru tersebut, termasuk

prasarana jalan, prasarana lalu lintas jalan, dan simpul transportasi.

d. Menyongsong abad Samudra

Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas menegaskan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pengertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa perlu adanya konektivitas layanan transportasi untuk menghubungkan Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki "tenggang ekologis" dengan Bantul, Gunung kidul dan Kulon Progo serta sebaliknya wilayah Bantul, Gunung kidul dan Kulon Progo yang memiliki hubungan "rujuk ekologis" terhadap Sleman dan Kota Yogyakarta.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2009-2029

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.

a. Arah pengembangan sistem pusat kegiatan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

- 1) Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara,
- 2) Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah

- a) pengembangan jaringan jalan,
- b) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang,
- c) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang,
- d) pengembangan pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul,
- e) pengembangan jaringan jalan kereta api dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur– barat, dan utara-selatan, pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

f. Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi

Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah menggunakan ukuran jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. Oleh karena itu, sistem transportasi sangat terkait dengan berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertemu yang berlangsung di atas bidang tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di

antaraguna lahan tersebut dengan menggunakan sistim jaringan transportasi.

Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Jika kepadatan dan kemacetan di jalan meningkat serta sistim pergerakan dalam suatu wilayah tidak ekonomis lagi perlu adanya pengendalian perluasan kota dengan memperhatikan sistem transportasi yang terintegrasi.

Tabel 3.5 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI RPJMD DIY : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI RPJMD DIY : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tersedianya layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Peningkatan keselamatan transportasi di jalan provinsi b. Peningkatan pelayanan angkutan umum c. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas d. Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan b. penyelenggaraan edukasi keselamatan lalu lintas c. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum d. peningkatan cakupan layanan angkutan dalam trayek e. peningkatan kinerja angkutan umum

			tidak dalam trayek f. peningkatan tertib perizinan angkutan g. pengembangan penyelenggaraan angkutan barang dan perkeretaapian h. penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal i. pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan j. pengelolaan terminal, <i>park and ride</i> dan perparkiran k. pengembangan terminal, <i>park and ride</i> dan perparkiran
--	--	--	---

Tabel 3.6 Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan	1. Cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang berkontribusi sebesar 50% 2. Mempertahankan kecepatan lalu

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
		lintas di jalan Provinsi dan perkotaan pada kawasan prioritas, yang berkontribusi sebesar 50%

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2017

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY dijelaskan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY

Sasaran Renstra Dishub DIY		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Peningkatan keselamatan transportasi di Jalan Provinsi	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Penyediaan edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas
2	Peningkatan pelayanan angkutan umum	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala
		Perbedaan kepentingan sebuah lokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
		Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat pengguna angkutan umum	Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan

Sasaran Renstra Dishub DIY		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kurangnya SDM yang bersertifikat dan peralatan penunjang pemeliharaan sarana dan prasarana	Penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan lalu lintas	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan
4	Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	Adanya fasilitas terminal Tipe C yang kurang standar	Pengembangan dan pengelolaan terminal tipe C dan pengelolaan parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Berdasarkan Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY di atas, bahwa sasaran Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW, Dinas Perhubungan sangat berkaitan dalam hal jaringan transportasi. Berikut kami tampilkan Tabel terkait hasil telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.8 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana jaringan transportasi	Rencana jaringan transportasi	Pengembangan jalur lintas selatan	sesuai	Pengembangan jaringan jalan wilayah selatan	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum Pembangunan simpul transportasi baru
Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa	sesuai	Pengembangan jaringan simpul transportasi (terminal)	- Adanya komitmen Pemda Kabupaten Bantul dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait - Dukungan kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan	Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan			angkutan masal	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut kajian KLHS program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sudah tercapai dengan capaian yang meningkat sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan, karena tidak berpengaruh negatif pada lingkungan.

Tabel 3.9 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan)		Meningkat	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat pengguna angkutan umum	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan
Persentase penduduk terlayani transportasi umum.		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya transportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada subbab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.11 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	18	9	14,25	7	9,5	5,75	63,5
2.	Tingginya angka kecelakaan	17,5	8,25	13,25	8,5	8	9,25	64,75
3.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	18	8,5	15,5	9,25	10,75	14,5	76,5
4.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan	17,5	9	15	9,5	10,5	15,75	77,25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.							

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.	77,25	
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	76,5	
3.	Tingginya angka kecelakaan	64,75	
4.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	63,5	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terpenuhiya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	n/a	73,71	75,05	76,4	77,47	79,08	79,08
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Streightht) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Salah satu teori pemilihan strategi yang tepat untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) adalah analisis SWOT.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan yang dapat kami cermati untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, kami sajikan dalam form sebagai berikut.

Internal Eksternal	Kekuatan/"Strenght" - Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas - Adanya komitmen yang tinggi - Adanya sarana dan prasarana dinas yang memadai - Adanya kantor dan fasilitas kerja	Kelemahan/"Weaknes" - Terbatasnya Sumberdaya - Jumlah personil terbatas memadai - Profesionalisme staf yang belum memadai - Produktifitas kerja yang masih rendah - Belum tersedianya database yang memadai
Peluang/"Opportunities" - Adanya pelimpahan wewenang : - UU No. 32 Th 2004 - PP No. 25 Th 2000 - Adanya dukungan	Strategi S-O - Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada - Memantapkan tujuan dan sasaran perangkat	Strategi W-O - Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas - Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil

Bupati 3. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi 4. Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian 5. Jangkauan wilayah yang luas 6. Rencana Strategis Pansela/JJLS 7. Adanya Jogja Outer Ringroad 8. Rencana Pembangunan Jalan Tol Jogja - Solo	daerah 3. mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja 4. merespon rencana strategis Pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengoptimalkan kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan	3.inventarisasi database
Tantangan/ “ Threats” 1. Masih tingginya kejadian kecelakaan Lalu Lintas 2. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah 3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi 4. Terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas 5. Menurunnya jumlah angkutan umum	Strategi S-T 1. Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat. 2. Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal 3. Mantapkan program pembangunan fasilitas 4. Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi	Tantangan/ “ Threats” 1. Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan 2. Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinnneka Tunggal Ika			
MISI ke 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target kinerja subkegiatan dikalikan 100%	100 persen	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 74.400.000	100 persen	Rp 75.400.000	100 persen	Rp 75.400.000	100 persen	Rp 374.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		2 dokumen	2 dokumen	Rp 4.000.000									2 dokumen	Rp 4.000.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	Rp 4.000.000	2 dokumen	Rp 4.000.000	2 dokumen	Rp 4.400.000	2 dokumen	Rp 4.400.000	8 dokumen	Rp 16.800.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		3 dokumen	3 dokumen	Rp 70.400.000									3 dokumen	Rp 70.400.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					3 laporan	Rp 70.400.000	3 laporan	Rp 70.400.000	3 laporan	Rp 71.000.000	3 laporan	Rp 71.000.000	12 laporan	Rp 282.800.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Daerah																
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 6.512.914.954	100 persen	Rp 6.636.775.245	100 persen	Rp 6.694.067.245	100 persen	Rp 6.742.407.353	100 persen	Rp 6.797.199.353	100 persen	Rp 33.383.364.150	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp 6.502.876.062									14 kali	Rp 6.502.876.062	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali										12 kali			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					51 orang	Rp 6.523.176.353	51 orang	Rp 6.580.468.353	51 orang	Rp 6.627.847.353	51 orang	Rp 6.682.639.353	204 orang	Rp 26.414.131.412	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil penyediaan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen	Rp. 103.560.000	3 dokumen	Rp. 103.560.000	3 dokumen	Rp. 103.560.00	3 dokumen	Rp. 103.560.00	12 dokumen	Rp. 414.240.000	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Kal.Trirenggo Kap.Ban

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perangkat Daerah	Kapasitas Sumberda ya Aparatur																
				Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberda ya Aparatur	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 perse n	Rp 10.000.000	100 perse n	Rp 10.000.000	100 perse n	Rp 10.000.000	100 pers en	Rp 10.000.000	100 persen	Rp 11.000.000	100 pers en	Rp 51.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupat en Bantul
		2.15.01.2.05.05	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5 doku men	Rp 5.000.000	5 doku men	Rp 5.000.000	5 doku men	Rp 5.000.000	5 dokum en	Rp 5.000.000	20 dok ume n	Rp 20.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trire nggo Kap.Ban tul
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang - Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bi mtek meningkat 80% dari 100 orang		80 orang	80 orang	Rp 10.000.000									80 oran g	Rp 10.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Pengirimn a Peserta Diklat Perhubun gan		5 orang	5 orang										5 oran g			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 5.000.000	100 orang	Rp 6.000.000	400 orang	Rp 21.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 125.655.300	100 persen	Rp 135.655.300	100 persen	Rp 135.655.300	100 persen	Rp 139.402.000	100 persen	Rp 139.402.000	100 persen	Rp 675.769.900	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		8 jenis	8 jenis	Rp 2.647.000									8 jenis	Rp 2.647.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					8 paket	Rp 2.647.000	8 paket	Rp 2.647.000	8 paket	Rp 2.662.000	8 paket	Rp 2.662.000	32 paket	Rp 10.618.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		4 jenis	4 jenis	Rp 25.500.000									4 jenis	Rp 25.500.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	Rp 25.500.000	4 paket	Rp 25.500.000	4 paket	Rp 25.500.000	4 paket	Rp 25.500.000	16 paket	Rp 102.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 jenis	18 jenis	Rp 909.800									18 jenis	Rp 909.800	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Tabung gas elpiji		6 tabung	6 tabung										6 tabung			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					19 paket	Rp 9.098.800	19 paket	Rp 9.098.800	19 paket	Rp 10.000.000	19 paket	Rp 10.000.000	76 paket	Rp 38.197.600	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		8 jenis	8 jenis	Rp 22.169.500									8 jenis	Rp 22.169.500		
				Penggandaan		30039 lembar	30039 lembar										30039 lembar			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					9 paket	Rp 22.169.500	9 paket	Rp 22.169.500	9 paket	Rp 25.000.000	9 paket	Rp 25.000.000	36 paket	Rp 94.339.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	Rp 1.200.000									1 jenis	Rp 1.200.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan					1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	1 paket	Rp 1.200.000	4 paket	Rp 4.800.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	20 Laporan	Rp 10.000.000	80 Laporan	Rp 40.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		25 dokumen	25 dokumen	Rp 65.040.000									25 dokumen	Rp 65.040.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				laporan penerima tamu		10 dokumen	10 dokumen										10 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan dalam daerah		80 dokumen	80 dokumen										80 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan luar		11 dokumen	11 dokumen										11 dokumen			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 507.420.150	100 persen	Rp 393.860.150	100 persen	Rp 490.378.150	100 persen	Rp 548.295.000	100 persen	Rp 636.060.200	100 persen	Rp 2.576.013.650	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan		1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.320.000									1 dokumen	Rp 50.320.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Materai		545 lembar	545 lembar										545 lembar			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 laporan	Rp 40.320.000	1 laporan	Rp 40.320.000	1 laporan	Rp 45.000.000	1 laporan	Rp 45.000.000	4 laporan	Rp 170.640.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan	Rp 38.400.000									12 bulan	Rp 38.400.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				pembayaran rekening Telepon		12 bulan	12 bulan										12 bulan			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 laporan	Rp 38.400.000	1 laporan	Rp 38.400.000	1 laporan	Rp 41.000.000	1 laporan	Rp 41.000.000	4 laporan	Rp 158.800.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		6 jenis	6 jenis	Rp 103.467.110									6 jenis	Rp 103.467.110	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Alat Tulis Kantor		35 jenis	35 jenis										35 jenis			
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen			
				Tabung Pemadam kebakaran		2 tabung	2 tabung										2 tabung			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 103.467.110	3 laporan	Rp 114.000.000	12 laporan	Rp 424.401.330	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul

TUJUAN	SASA RAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELIN E)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kantor yang Disediaka n																
		2.15.0 1.2.08 .04	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokume n	1 doku men	Rp 315 .23 3.0 40									1 dok ume n	Rp 315.23 3.040	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Laporan administra si kepegawai an		1 dokume n	1 doku men										1 dok ume n			
				Laporan perawatan kendaraan		1 dokume n	1 doku men										1 dok ume n			
				Laporan kegiatan administra si umum		1 dokume n	1 doku men										1 dok ume n			
				Pengelola Keuangan dan BMD		156 orang bulan	156 orang bula n										156 oran g bula n			
				Premi asuransi		12 bulan	12 bula n										12 bula n			
				Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum					5 lapor an	Rp 211.67 3.040	5 lapor an	Rp 308.19 1.040	5 lapor an	Rp 358.8 27.89 0	5 lapora n	Rp 436.0 60.20 0	20 lapo ran	Rp 1.314. 752.17 0	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trire nggo Kap.Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kantor yang Disediakan																
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja Pemeliharaan BMD																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 237.672.658	100 persen	Rp 280.218.000	100 persen	Rp 308.239.800	100 persen	Rp 1.301.475.774	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Pajaknya					20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	20 unit	Rp 100.000.000	80 unit	Rp 400.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirennggo Kap.Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET			Rp
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		12230 liter	12230 liter	Rp 218.701.350									12230 liter	Rp 218.701.350	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian		
				pajak kendaraan		29 unit	29 unit										29 unit				
				KIR Kendaraan		18 unit	18 unit										18 unit				
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		18 unit	18 unit										18 unit				
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		9 unit	9 unit										9 unit				
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan		6 unit	6 unit										6 unit				

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				roda 6																
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 unit	Rp 118.70 1.350	14 unit	Rp 118.70 1.350	14 unit	Rp 160.2 18.00 0	14 unit	Rp 186.2 39.80 0	56 unit	Rp 583.86 0.500	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	Rp 18.971.308									3 unit	Rp 18.971.308	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi					2 unit	Rp 18.971.308	2 unit	Rp 18.971.308	2 unit	Rp 20.00 0.000	2 unit	Rp 22.00 0.000	8 unit	Rp 79.942.616	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap.Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Rasio Konektivitas Kabupaten dan Kinerja lalu lintas Kabupaten																
				Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	30,43 persen	30,43 persen	Rp 13.012.540.000	30,43 persen	Rp 9.220.389.000	30,43 persen	Rp 10.689.762.000	30,43 persen	Rp 12.312.443.000	30,43 persen	Rp 14.128.890.000	30,43 persen	Rp 59.364.024.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
				Kinerja lalu lintas Kabupaten	V / C Ratio di Jalan kabupaten	0,30 angka	0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka		0,30 angka			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan Yang Memadai																
				Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan perlengkapan jalan dikalikan 100%	13.92 persen	13.92 persen	Rp 10.262.925.000	18,19 persen	Rp 5.835.967.500	22,46 persen	Rp 7.130.439.500	26,74 persen	Rp 7.929.760.500	31,02 persen	Rp 9.382.939.250	31,02 persen	Rp 40.542.031.750	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.15.0 2.2.02 .01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Pembangunan halte		unit	unit	Rp -									unit	Rp -	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang Terbangun					1 unit	Rp 60.500.000	1 unit	Rp 66.550.000	1 unit	Rp 73.205.000	1 unit	Rp 90.000.000	4 unit	Rp 290.255.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul
		2.15.0 2.2.02 .02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Cermin tikungan		4 unit	4 unit	Rp 9.356.800.000									4 unit	Rp 9.356.800.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Bantul
				LPJU		200 unit	200 unit										200 unit			
				Pagar Pengaman Jalan																
				Paku marka																
				Delinator																
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					950 unit	Rp 4.778.730.000	950 unit	Rp 5.967.478.250	950 unit	Rp 6.650.503.125	950 unit	Rp 7.966.281.637	3800 unit	Rp 25.362.993.012	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	Kab. Bantul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia dibagi Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan dikalikan 100%	40 persen	40 persen	Rp 199.200.000	40 persen	Rp 240.000.000	45 persen	Rp 250.000.000	50 persen	Rp 260.000.000	50 persen	Rp 286.000.000	50 persen	Rp 1.235.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan terminal		3 unit	3 unit	Rp 199.200.000									3 unit	Rp 199.200.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan					4 unit	Rp 240.000.000	4 unit	Rp 250.000.000	4 unit	Rp 260.000.000	4 unit	Rp 286.000.000	16 unit	Rp 1.036.000.000	Ka Sie Terminal dan Prasarana Transportasi	Kab.Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Dipelihara																
		2.15.0 2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Lolos Uji																
				Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun dibagi jumlah kendaraan wajib uji	50 persen	50 persen	Rp 949.300.000	51 persen	Rp 1.044.230.000	52,5 persen	Rp 1.148.653.000	53,8 persen	Rp 1.263.518.300	55,2 persen	Rp 1.389.870.130	55,2 persen	Rp 5.795.571.430	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul
		2.15.0 2.2.05 .03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Pemeriksaan /Register Kendaraan Baru		2000 lembar	2000 lembar	Rp 74.300.000									2000 lembar	Rp 74.300.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	
				Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor		1500 buah	1500 buah										1500 buah			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar					10080 unit	Rp 65.230.000	10584 unit	Rp 71.753.000	11113 unit	Rp 78.928.300	11668 unit	Rp 86.821.130	43445 unit	Rp 302.732.430	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)		10000 buah	10000 buah	Rp 560.205.500									10000 buah	Rp 560.205.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	
				Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		52860 lembar	52860 lembar										52860 lembar			
				Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor		20 dus	20 dus										20 dus			
				Cleaning Kit Printer Smart Card		6 paket	6 paket										6 paket			
				Surat Keterangan		10000 buah	10000										10000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n Tidak Lulus Uji			buah										bua h			
				Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji		19650 lembar	19650 lembar										19650 lembar			
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					10000 dokumen	Rp 595.650.000	10000 dokumen	Rp 655.215.000	10000 dokumen	Rp 720.736.500	10000 dokumen	Rp 792.810.150	40000 dokumen	Rp 2.764.411.650	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		2 kali	2 kali	Rp 49.999.500									2 kali	Rp 49.999.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 laporan	Rp 55.000.000	2 laporan	Rp 60.500.000	2 laporan	Rp 66.550.000	2 laporan	Rp 73.205.000	8 laporan	Rp 255.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.15.0 2.2.05 .06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor		1 kali	1 kali	Rp 35.000.000									1 kali	Rp 35.000.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji					1 laporan	Rp 55.000.000	1 laporan	Rp 60.500.000	1 laporan	Rp 66.550.000	1 laporan	Rp 73.205.000	4 laporan	Rp 255.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.0 2.2.05 .07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis Alat Uji		1 kali	1 kali	Rp 216.300.000									1 kali	Rp 216.300.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Upgrade Software dan Hardware		1 kali	1 kali										1 kali			
				Pemeliharaan Sipentol		1 kali	1 kali										1 kali			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten /Kota	Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota																
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dikalikan 100	47.61 persen	47.61 persen	Rp 1.478.415.000	51.39 persen	Rp 1.951.471.500	55,17 persen	Rp 1.997.077.500	58,95 persen	Rp 2.479.213.000	62,74 persen	Rp 2.672.134.300	62,74 persen	Rp 10.578.311.300	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten		1 dokumen	1 dokumen	Rp 440.825.000									1 dokumen	Rp 440.825.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	
				Dokumen survey lalu lintas		2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota					3 laporan	Rp 450.560.000	3 laporan	Rp 495.616.000	3 laporan	Rp 545.177.600	3 laporan	Rp 599.695.360	12 laporan	Rp 2.091.048.960	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	Kab. Bantul
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan , Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL		1 unit	0 unit	Rp 767.420.000									0 unit	Rp 767.420.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	
				Marka jalan		175 meter2	175 meter2										175 meter2			
				Papan himbauan keselamatan rawan		1 unit	0 unit										0 unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kecelakaan																
				Pemeliharaan APILL, rambu dan marka		5 jenis	5 jenis										5 jenis			
				Pita pengaduh		175 meter2	0 meter2										0 meter2			
				Rambu lalu lintas		45 unit	45 unit										45 unit			
				Rambu Pendahulu Penegas Jurusan		5 unit	0 unit										0 unit			
				Tali pembatas arus lalu lintas		500 meter	meter										meter			
				Jalur Pesepeda		300 meter2	300 meter2										300 meter2			
				Flashing lamp		5 unit	0 unit										0 unit			
				Zona Sekolah		2 paket	2 paket										2 paket			
				Jumlah Pengadaan , Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan					163 unit	Rp 1.230.211.500	163 unit	Rp 1.230.211.500	163 unit	Rp 1.650.000.000	163 unit	Rp 1.760.000.000	652 unit	Rp 5.870.423.000	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	Laporan event simpatik		1 dokumen	1 dokumen	Rp 4.970.000									1 dokumen	Rp 4.970.000	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas	
				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen			
				Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota					3 dokumen	Rp 5.500.000	3 dokumen	Rp 6.050.000	3 dokumen	Rp 6.655.000	3 dokumen	Rp 7.320.500	12 dokumen	Rp 25.525.500	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas	Kab. Bantul
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi		1 dokumen	1 dokumen	Rp 265.200.000									1 dokumen	Rp 265.200.000	Kasie Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas	
				Laporan Pembinaan operasional LLAJ		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen			
				Laporan pembinaan		1 dokumen	1 dokumen										1 dok			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Jumlah angkutan umum orang dan/atau barang yang layak beroperasi dibagi jumlah angkutan umum orang dan/barang yang ada di kabupaten Bantul dikalikan 100%	30,9 persen	34,1 persen	Rp 24.300.000	37 persen	Rp 40.480.000	39,5 persen	Rp 44.528.000	41,7 persen	Rp 148.980.800	43,5 persen	Rp 153.878.880	43,5 persen	Rp 412.167.680	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul
		2.15.02.2.09	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum		2 dokumen	2 dokumen	Rp 24.300.000									2 dokumen	Rp 24.300.000		
				Laporan data angkutan		1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	Jumlah angkutan umum orang dalam trayek dibagi jumlah kebutuhan angkutan umum orang dalam trayek di kabupaten Bantul dikalikan 100%	56,5 persen	56,5 persen	Rp 65.600.000	56,5 persen	Rp 72.160.000	56,5 persen	Rp 79.376.000	56,5 persen	Rp 187.313.600	56,5 persen	Rp 196.044.960	56,5 persen	Rp 600.494.560	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek		2 dokumen	2 dokumen	Rp 65.600.000									2 dokumen	Rp 65.600.000		
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan					2 dokumen	Rp 72.160.000	2 dokumen	Rp 79.376.000	2 dokumen	Rp 187.313.600	2 dokumen	Rp 196.044.960	8 dokumen	Rp 534.894.560	Kasie Angkutan Jalan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota																
		2.15.0 2.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya rasio ijin trayek																
				Rasio Ijin Trayek	Jumlah ijin trayek yang ada dibagi jumlah kebutuhan ijin trayek	0.28 angka	0.28 angka	Rp 32.800.000	0.28 angka	Rp 36.080.000	0.28 angka	Rp 39.688.000	0.28 angka	Rp 43.656.800	0.28 angka	Rp 48.022.480	0.28 angka	Rp 200.247.280	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bantul
		2.15.0 2.2.14 .01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan		1 dokumen	1 dokumen	Rp 32.800.000									1 dokumen	Rp 32.800.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
				Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan					1 laporan	Rp 36.080.000	1 laporan	Rp 39.688.000	1 laporan	Rp 43.656.800	1 laporan	Rp 48.022.480	4 laporan	Rp 167.447.280	Kasie Angkutan Jalan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
			PROGRAM PENYELENGGARANN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan																
				Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	n/a	n/a	Rp -	100 persen	Rp 500.000.000	100 persen	Rp 3.390.000.000	100 persen	Rp 3.680.000.000	100 persen	Rp 2.010.000.000	100 persen	Rp 9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantu

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tercainya Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten																
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten		n/a	n/a	Rp -	100 persen	Rp 500.00 0.000	100 persen	Rp 3.390.000.000	100 persen	Rp 3.680.000.000	100 persen	Rp 2.010.000.000	100 persen	Rp 9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rambu Lalu Lintas					200 unit	Rp 300.00 0.000							200 unit	Rp 300.00 0.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Pajimatan, Imogiri
				LPJU					10 unit	Rp 200.00 0.000							10 unit	Rp 200.00 0.000		
				Jumlah Dokumen							1 doku	Rp 660.00	1 doku	Rp 940.0			2 dok	Rp 1.600.		

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri							men	0.000	men	00.000			umen	000.000		
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	LPJU															Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas-Parangtritis (Ruas Jalan:Kretetek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas)
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang							1 dokumen	Rp 1.300.000.000	1 dokumen	Rp 1.700.000.000	1 dokumen	Rp 840.000.000	3 dokumen	Rp 3.840.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas-Parangtritis

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET			Rp
								TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Strategis Pantai Samas-Parangtritis																(Ruas Jalan:Kretetek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungkingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas)	
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	LPJU															Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kerto-Pleret (Ruas Jalan: Jejeran-Pleret; Jogoragan – Pleret; Bawuran-Pleret)	
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan							1 dokumen	Rp 1.150.000.000	1 dokumen	Rp 1.040.000.000	1 dokumen	Rp 1.170.000.000	3 dokumen	Rp 3.360.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kerto-Pleret (Ruas Jalan: Jejeran-Pleret; Jogorag	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kerto-Pleret																an – Pleret; Bawuran– Pleret)
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	LPJU															Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas–Parangtritis (Ruas Jalan: Kretek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas)
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis							1 dokumen	Rp 280.000.000					1 dokumen	Rp 280.000.000	Kasie Keselamatan Lalu Lintas	menuju Kawasan Samas–Parangtritis (Ruas Jalan: Kretek – Depok;

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	FORMULA (Keterangan)	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
						TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																				Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas
Total								Rp 20.480.603.062		Rp 17.208.752.353		Rp 21.721.935.353		Rp 23.788.165.353		Rp 24.106.191.353		Rp 107.305.647.474		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul, Perda No. 6 Tahun 2021

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	n/a	13,92 persen	13,92 persen	18,19 persen	22,46 persen	26,74 persen	31,02 persen	31,02 persen
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	n/a	40 persen	40 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen	50 persen
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	n/a	50 persen	50 persen	51 persen	52,5 persen	53,8 persen	55,2 persen	55,2 persen

Tujuan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	n/a	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....